

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Abdul Manan. 2006. *Aspek-aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Achmad Santosa. *Good Governance dan Hukum Lingkungan*. Jakarta.
- Ahmad Yani. 2011. *Pembentukan Undang-Undang & Perda*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Alatas, Syed Husein. 2004. *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penyelajahan dengan Data Kontemporer*, LP3ES. Jakarta.
- Bintoro Tjokroamidjojo. 2000. *Paradigma Baru Management Pembangunan dalam Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional*. Rajawali. Jakarta.
- Darmodiharjo, Darji & Shidarta, 1995. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Johnny Ibrahim. 2008. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang. Bayumedia.
- M. Djafar Saidi. 2014. *Pembaruan Hukum Pajak*. Rajawali Press.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Muhammad Daud Ali. 1990. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia Edisi Keenam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Pound, Roscoe. 1996. *Pengantar Filsafat Hukum*, (Terj.) Muhammad Radjab, Penerbit Bhratara, Jakarta
- Rahardjo, Satjipto. 1996. *Hukum dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial*
- Reni Prasetyo. 2013. *Pelayanan Publik Di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati (Studi Tentang Pelaksanaan UU No 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik)*. Universitas Negeri Semarang.
- Riawan Tjandra. dkk. 2010. *Legislative Drafting: Teori dan Teknik Perancangan Undang-Undang*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Soejono Soekanto dan Sri Mamudji. 2004. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Rajawali Press. 2004).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara Negara

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Menteri Komunikasi Informasi Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81 Tahun 1993 tentang Pedoman Tata Laksana Pelayanan Umum.

Peraturan Daerah Kota Malang No 6 Tahun 2013 Tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi.

Surat Edaran Menteri Keuangan No. S-209/PK.3/2016 Tentang Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.